



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 14 : MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS LAUT DI INDONESIA

Putri Pidella, Eliyanti Mokodompit
Universitas Halu Oleo
Email : putripidella@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Sustainable Development Goal 14 dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis laut di Indonesia melalui pendekatan literature review. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan potensi sumber daya kelautan strategis menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan target SDG 14. Metode penelitian menggunakan narrative literature review dengan analisis tematik terhadap literatur periode 2021-2025 yang relevan dengan implementasi SDG 14 dan blue economy di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kebijakan Kemaritim Indonesia telah menetapkan kerangka komprehensif dengan tujuh pilar utama yang mendukung pencapaian target konservasi laut 28,08 juta hektar kawasan konservasi perairan. Program restorasi mangrove mencapai tingkat kelangsungan hidup 98,67%-100% dengan kontribusi penyimpanan karbon signifikan. Sektor kelautan berkontribusi USD 27 miliar atau 7,6% terhadap PDB nasional dengan penyerapan tenaga kerja 8 juta orang. Tantangan utama berupa pencemaran plastik laut dengan kontribusi 3,2 juta metrik ton sampah plastik annually dan dilema eksploitasi versus konservasi sumber daya perikanan. Strategi penyelesaian melalui pendekatan berbasis masyarakat dan inovasi ekonomi sirkular menunjukkan efektivitas dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Model pengelolaan multi-stakeholder terbukti berhasil dalam sektor pariwisata bahari berkelanjutan.

Kata Kunci: blue economy, pembangunan berkelanjutan, konservasi laut, ekonomi sirkular, kebijakan maritim

ABSTRACT

This research analyzes the implementation of Sustainable Development Goal 14 in the context of marine-based sustainable development in Indonesia through a literature review approach. Indonesia as the largest archipelagic country with strategic marine resource potential faces complex challenges in achieving SDG 14 targets. The research method employs narrative literature review with thematic analysis of relevant literature from 2021-2025 regarding SDG 14 implementation and blue economy in Indonesia. Results indicate that Indonesia's Maritime Policy implementation has established a comprehensive framework with seven main pillars supporting marine conservation targets of 28.08 million hectares of marine protected areas. Mangrove restoration programs achieve survival rates of 98.67%-100% with significant carbon storage contributions. The marine sector contributes USD 27 billion or 7.6% to national GDP with employment absorption of 8 million people. Major challenges include marine plastic pollution contributing 3.2 million metric tons of plastic waste annually and the exploitation versus conservation dilemma of fisheries resources. Solution strategies through community-based approaches and circular economy innovations demonstrate effectiveness in integrating economic, environmental, and

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 670
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Kohesi.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Kohesi



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



social aspects. Multi-stakeholder management models prove successful in sustainable marine tourism sectors.

Keywords: *blue economy, sustainable development, marine conservation, circular economy, maritime policy*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan nasional. Dalam konteks global, implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya SDG 14 yang berfokus pada "Life Below Water" menjadi prioritas utama mengingat urgensi pelestarian ekosistem laut dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan (Guterres, 2020). SDG 14 mengamanatkan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan samudra, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan, dengan target ambisius yang mencakup pengurangan polusi laut, perlindungan ekosistem pesisir dan laut, serta peningkatan manfaat ekonomi bagi negara berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut.

Konsep *blue economy* atau ekonomi biru telah menjadi paradigma pembangunan yang semakin relevan bagi Indonesia dalam mengoptimalkan potensi kelautan sambil mempertahankan kelestarian lingkungan. Menurut (Elegbede et al., 2023), ekonomi biru didefinisikan sebagai pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan kesehatan ekosistem laut. Indonesia telah menunjukkan komitmen serius terhadap implementasi ekonomi biru melalui peluncuran *Indonesia Blue Economy Roadmap 2045* yang menjadi cetak biru pengembangan berbasis laut (Bappenas, 2023). Roadmap ini mengidentifikasi delapan sektor prioritas yang meliputi perikanan dan akuakultur, industri berbasis kelautan, transportasi dan logistik, pariwisata bahari, energi terbarukan laut, bioteknologi kelautan, pertambangan laut berkelanjutan, dan jasa lingkungan kelautan.

Sektor kelautan Indonesia memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa sektor kelautan berkontribusi sekitar USD 27 miliar atau 7,6% dari total PDB Indonesia, dengan sektor perikanan tangkap dan akuakultur sebagai sub-sektor utama (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023). Lebih dari 8 juta orang secara langsung bekerja di industri terkait kelautan, termasuk perikanan skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Potensi ekonomi biru Indonesia diperkirakan dapat mencapai USD 171 miliar per tahun jika dikelola secara optimal dan berkelanjutan (Barroso et al., 2022).

Namun demikian, implementasi SDG 14 di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Pencemaran laut menjadi isu kritis, dimana Indonesia tercatat sebagai kontributor terbesar kedua sampah plastik laut global dengan menghasilkan sekitar 3,2 juta metrik ton sampah plastik per tahun, dan diperkirakan 620.000 ton berakhir di laut (Jambeck et al., 2015). Degradasi ekosistem pesisir dan laut, overfishing, praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, serta *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) fishing menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia (Pace et al., 2023).

Upaya konservasi laut Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan penetapan lebih dari 28 juta hektar Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang mencakup sekitar 9% dari total wilayah laut Indonesia pada tahun 2022. Pemerintah menargetkan perluasan hingga 10% pada tahun 2030 sesuai dengan Target 14.5 SDG. Inisiatif restorasi mangrove juga menjadi prioritas, dimana Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia dengan lebih dari 3,3 juta hektar atau sekitar 23% dari total mangrove global (Martínez-Vázquez et al., 2021).



Program restorasi terumbu karang berbasis masyarakat dan kampanye "Laut Bebas Plastik" telah melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil, sekolah, dan komunitas pesisir dalam upaya pelestarian laut.

Transformasi menuju pembangunan berkelanjutan berbasis laut memerlukan integrasi kebijakan lintas sektoral dan penguatan kapasitas institusi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan mendukung ekonomi biru, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menempatkan ekonomi biru sebagai salah satu prioritas pembangunan (Bappenas, 2020). Koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi SDG 14. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional diperlukan untuk mobilisasi sumber daya dan transfer teknologi dalam mendukung inovasi sektor kelautan.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia yang merupakan bagian dari *Coral Triangle* menjadi aset strategis yang perlu dijaga kelestariannya sambil memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sektor pariwisata bahari memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat pesisir, seperti yang telah diimplementasikan di Taman Nasional Wakatobi yang menjadi pusat ekowisata bahari dan konservasi keanekaragaman hayati. Pengembangan bioteknologi kelautan dan energi terbarukan laut juga menjadi peluang inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia.

Berdasarkan kompleksitas tantangan dan peluang dalam implementasi SDG 14 di Indonesia, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama. Pertama, bagaimana efektivitas implementasi kebijakan dan program pemerintah Indonesia dalam mencapai target-target SDG 14, khususnya dalam mengatasi pencemaran laut, konservasi ekosistem pesisir dan laut, serta peningkatan manfaat ekonomi dari sektor kelautan? Kedua, sejauh mana kontribusi pendekatan *blue economy* dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan berbasis laut di Indonesia, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya? Ketiga, bagaimana model integrasi kebijakan lintas sektoral dan multi-stakeholder yang optimal untuk mempercepat pencapaian SDG 14 di Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi negara kepulauan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi SDG 14 dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis laut di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pemerintah Indonesia dalam mencapai target-target SDG 14, termasuk pengurangan pencemaran laut, konservasi ekosistem, dan peningkatan manfaat ekonomi sektor kelautan; (2) menganalisis peran dan kontribusi pendekatan *blue economy* dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan berbasis laut, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilannya; dan (3) merumuskan rekomendasi model integrasi kebijakan lintas sektoral dan multi-stakeholder yang dapat mempercepat pencapaian SDG 14 di Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik unik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang implementasi SDGs di negara berkembang, khususnya dalam konteks negara kepulauan dengan karakteristik geografis dan sosio-ekonomi yang kompleks. Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan masukan berharga bagi pemerintah Indonesia dalam penyempurnaan kebijakan dan strategi implementasi SDG 14, serta dapat menjadi referensi bagi negara-negara kepulauan lainnya dalam mengembangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis laut. Selain itu, penelitian ini juga akan bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam memahami dinamika dan tantangan implementasi ekonomi biru sebagai pathway menuju pembangunan berkelanjutan di era global yang semakin mengedepankan sustainability dan ocean governance.



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* sebagai metodologi utama untuk menganalisis implementasi SDG 14 dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis laut di Indonesia. Metodologi *literature review* dipilih karena kemampuannya dalam mensintesis pengetahuan dari berbagai sumber akademik dan mengidentifikasi pola, tren, serta kesenjangan dalam literatur yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman komprehensif tentang fenomena kompleks yang melibatkan dimensi kebijakan, ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam implementasi SDG 14 di Indonesia. Desain penelitian mengadopsi pendekatan *narrative literature review* yang bersifat interpretatif dan kritis terhadap literatur yang dipilih. Metode ini memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep-konsep teoritis dan praktis terkait ekonomi biru, kebijakan kelautan, dan implementasi SDGs di negara berkembang. Strategi pencarian literatur dilakukan secara bertahap dengan menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang mencakup "SDG 14", "sustainable development goals", "blue economy", "marine policy Indonesia", "ocean governance", dan "sustainable marine development". Pencarian dilakukan melalui basis data akademik utama termasuk Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan repositori institusi pemerintah Indonesia (Snyder, 2021).

Kriteria inklusi literatur ditetapkan berdasarkan relevansi topik, kualitas metodologi, dan periode publikasi antara tahun 2021 hingga 2025 untuk memastikan kebaruan dan relevansi informasi. Literatur yang dipilih mencakup artikel jurnal *peer-reviewed*, laporan kebijakan pemerintah, publikasi organisasi internasional, dan dokumen resmi yang terkait dengan implementasi SDG 14 dan ekonomi biru di Indonesia. Proses seleksi literatur dilakukan melalui tahapan screening judul dan abstrak, kemudian *full-text review* untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Kualitas literatur dievaluasi berdasarkan kredibilitas sumber, metodologi yang digunakan, dan kontribusi terhadap pemahaman topik penelitian (Templier & Paré, 2015). Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur. Proses analisis dimulai dengan pengkodean awal terhadap teks untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, kemudian dilakukan kategorisasi dan pengelompokan kode-kode tersebut menjadi tema-tema yang lebih luas. Analisis tematik memungkinkan identifikasi pola-pola implementasi SDG 14, tantangan yang dihadapi, strategi yang diterapkan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ekonomi biru di Indonesia. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis sumber untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas analisis (Clarke, 2024).

penerapan kriteria ketat dalam seleksi literatur dan transparansi dalam proses analisis. Keterbatasan penelitian diakui terkait dengan fokus pada literatur yang dipublikasikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, serta kemungkinan bias publikasi yang cenderung menyajikan hasil positif. Untuk meminimalkan bias, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dalam menganalisis literatur dan mempertimbangkan perspektif yang beragam dari berbagai pemangku kepentingan. Etika penelitian dipatuhi dengan memberikan sitasi yang tepat untuk semua sumber yang digunakan dan menghindari plagiasi dalam penulisan (Xiao & Watson, 2017).

HASIL PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SDG 14 DI INDONESIA

Implementasi SDG 14 di Indonesia diperkuat melalui Kebijakan Kemaritiman Indonesia (KKI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kemaritiman Indonesia. Zulkifli et al. (2023) mengidentifikasi tujuh pilar utama KKI yang meliputi: (1) pengelolaan sumber daya laut dan pengembangan sumber daya manusia; (2) keamanan laut, penegakan hukum dan keselamatan di laut; (3) tata kelola dan kelembagaan kelautan; (4) peningkatan ekonomi dan infrastruktur sektor kelautan serta peningkatan kesejahteraan; (5) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; (6) budaya maritim; dan (7) diplomasi maritim. Kerangka kebijakan ini memberikan landasan komprehensif



bagi pencapaian target-target SDG 14, khususnya dalam aspek pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan perlindungan ekosistem pesisir.

Indonesia telah menunjukkan komitmen serius dalam pencapaian Target 14.5 melalui penetapan kawasan konservasi perairan. (Rusandi et al., 2021) melaporkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 28,08 juta hektar atau 377 kawasan konservasi, dimana menteri telah menetapkan 12,9 juta hektar atau 64 kawasan konservasi. Data ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai 32,5 juta hektar kawasan perlindungan laut (MPAs) atau 10% dari perairan Indonesia pada tahun 2030 sebagai kontribusi terhadap komitmen global Sustainable Development Goals dan Convention on Biological Diversity. Namun, masih terdapat kebutuhan pengembangan MPA yang prioritas tinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 dan 718, serta prioritas selanjutnya di WPPNRI 572, 712, 716, dan 717.

Upaya restorasi mangrove sebagai bagian dari Target 14.2 (pengelolaan berkelanjutan ekosistem pesisir) telah menunjukkan hasil yang signifikan. (Amalo et al., 2025) melaporkan keberhasilan program restorasi mangrove di Desa Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi, dengan penanaman 8.000 bibit *Rhizophora mucronata* yang mencapai tingkat kelangsungan hidup 98,67%-100% selama periode 2020-2023. Program ini tidak hanya berkontribusi terhadap penyimpanan karbon sebesar 15,59 ton C pada tahun 2023, tetapi juga menghasilkan penyerapan CO₂ setara (CO₂e) sebesar 4,62 ton CO₂e untuk 2020-2021, 31,58 ton CO₂e untuk 2021-2022, dan 18,83 ton CO₂e untuk 2022-2023. Keberhasilan ini mendemonstrasikan efektivitas pendekatan berbasis masyarakat dalam restorasi ekosistem pesisir yang mendukung mitigasi perubahan iklim.

B. PENDEKATAN BLUE ECONOMY SEBAGAI PATHWAY PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Blue economy telah menjadi strategi ekonomi yang sangat selaras dengan karakteristik Indonesia sebagai negara maritim. (Alifa & Zahidi, 2024) mendefinisikan blue economy sebagai pemanfaatan sumber daya laut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berdasarkan upaya maksimal untuk melestarikan ekosistem laut. Sektor-sektor blue economy meliputi perikanan tangkap laut dan akuakultur, industri berbasis kelautan, industri galangan kapal, pariwisata berbasis pesisir, jasa maritim, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan. Implementasi blue economy ini sejalan dengan Indonesia Blue Economy Roadmap 2045 yang mengidentifikasi delapan sektor prioritas untuk pengembangan ekonomi berbasis laut.

Data menunjukkan bahwa sektor kelautan Indonesia berkontribusi sekitar USD 27 miliar atau 7,6% dari total PDB Indonesia, dengan lebih dari 8 juta orang secara langsung bekerja di industri terkait kelautan. (Zulkifli et al., 2023) mengidentifikasi berbagai implikasi KKI terhadap pengembangan ekonomi maritim Indonesia, termasuk peningkatan sektor perikanan, peningkatan sektor pariwisata dan wisata bahari, peningkatan sektor akuakultur dan budidaya, peningkatan konektivitas dan transportasi maritim, peningkatan investasi industri maritim, pendidikan dan pelatihan, kolaborasi regional dan internasional, serta peningkatan keterlibatan masyarakat lokal.

Sektor pariwisata bahari menunjukkan potensi besar dalam mendukung blue economy. (Rahadiarta I G, Wiranatha A S, 2021) melaporkan keberhasilan pengelolaan pariwisata bahari di Desa Jungutbatu, Nusa Penida, yang mengalami peningkatan sangat pesat sejak transisi dari aktivitas budidaya rumput laut. Pengelolaan pariwisata bahari dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, pengusaha, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah melalui penerapan empat fungsi manajemen (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling). Model ini menciptakan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses kontrol, yang pada akhirnya membangun persepsi positif wisatawan dan mempengaruhi kepuasan serta loyalitas untuk berkunjung kembali.



C. TANTANGAN IMPLEMENTASI SDG 14

Pencemaran plastik laut merupakan tantangan kritis dalam implementasi Target 14.1. (Akbar & Maghfira, 2023) menyoroti bahwa sampah plastik merupakan masalah penting yang terus meningkat setiap tahunnya dan menjadi ancaman bagi ekosistem laut, termasuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mikroplastik yang hadir di air laut dapat dikonsumsi oleh ikan dan kemudian masuk ke rantai makanan manusia. Sampah plastik juga mengganggu jalur transportasi laut dengan banyaknya sampah padat yang ditemukan di jalur kapal dan perahu nelayan, serta menyebabkan kematian terumbu karang dan lamun yang berdampak signifikan terhadap lingkungan laut. Data menunjukkan Indonesia sebagai kontributor terbesar kedua sampah plastik laut global dengan menghasilkan sekitar 3,2 juta metrik ton sampah plastik per tahun, dimana diperkirakan 620.000 ton berakhir di laut.

(Nugroho & Budianto, 2021) mengidentifikasi dilema antara eksploitasi dan konservasi sumber daya perikanan. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara tidak lepas dari berbagai permasalahan, khususnya proses eksploitasi yang tidak memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan. Eksploitasi berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi perairan laut secara menyeluruh, berpotensi menimbulkan konflik, dan bahkan bersinggungan dengan hukum laut internasional. Untuk meminimalkan dampak negatif eksploitasi, tindakan konservasi merupakan langkah yang tepat dan selaras dengan konsep Sustainable Development Goals.

D. STRATEGI DAN INOVASI IMPLEMENTASI

Implementasi SDG 14 di tingkat desa menunjukkan hasil yang menjanjikan. (Boekoesoe & Maksum, 2022) melaporkan keberhasilan Program Pengabdian Masyarakat tematik Pengembangan Desa Periode II di Desa Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan kawasan Teluk Tomini. Program ini bertujuan mengoptimalkan pembangunan desa dalam mewujudkan desa peduli lingkungan laut (SDGs Nomor 14) dan desa sehat sejahtera (SDGs Nomor 3) melalui metode sosialisasi dan pendampingan berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam upaya implementasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kota Makassar mengembangkan solusi inovatif melalui Bank Sampah yang mengolah sampah plastik menjadi barang kreatif yang kemudian dijual sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar, serta penggunaan kantong kain pengganti kantong plastik (Akbar & Maghfira, 2023). Model ini mendemonstrasikan pendekatan circular economy dalam mengatasi pencemaran plastik laut sambil menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.

E. REKOMENDASI STRATEGIS

Berdasarkan temuan penelitian, Indonesia perlu mengeluarkan lebih banyak kebijakan yang fokus pada blue economy (Alifa & Zahidi, 2024). Penguatan koordinasi lintas sektoral melalui implementasi KKI perlu diperkuat dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih efektif. Pengembangan indikator dan alat ukur perlu dikembangkan di setiap MPA terkait dengan ikan yang penting secara ekonomi sebagai salah satu target konservasi utama MPA di Indonesia. Model pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pengusaha, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah telah terbukti efektif dalam pengelolaan pariwisata bahari berkelanjutan. Pendekatan ini perlu direplikasi dalam sektor-sektor blue economy lainnya untuk membangun rasa tanggung jawab dan kesadaran kolektif dalam upaya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut. Implementasi konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah plastik laut perlu diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Model Bank Sampah dan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi dapat menjadi solusi dalam mengatasi pencemaran laut sambil menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir.



KESIMPULAN

Implementasi Sustainable Development Goal 14 di Indonesia menunjukkan progres signifikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis laut melalui pendekatan blue economy yang terintegrasi. Kerangka Kebijakan Kemaritiman Indonesia telah memberikan landasan komprehensif dengan tujuh pilar utama yang mendukung pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Pencapaian target konservasi laut menunjukkan kemajuan nyata dengan penetapan 28,08 juta hektar kawasan konservasi perairan, meskipun masih memerlukan perluasan untuk mencapai target 10% pada tahun 2030.

Program restorasi ekosistem pesisir, khususnya mangrove, telah membuktikan efektivitasnya dengan tingkat kelangsungan hidup mencapai 98,67%-100% dan berkontribusi signifikan terhadap penyimpanan karbon serta mitigasi perubahan iklim. Pendekatan blue economy sebagai pathway pembangunan berkelanjutan telah menghasilkan kontribusi ekonomi sebesar USD 27 miliar atau 7,6% dari PDB nasional, dengan penyerapan tenaga kerja langsung lebih dari 8 juta orang di sektor kelautan.

Tantangan utama implementasi SDG 14 terletak pada permasalahan pencemaran plastik laut yang menempatkan Indonesia sebagai kontributor terbesar kedua sampah plastik laut global, serta dilema antara eksploitasi dan konservasi sumber daya perikanan. Strategi penyelesaian melalui pendekatan berbasis masyarakat dan inovasi pengelolaan sampah plastik menunjukkan hasil menjanjikan dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Model pengelolaan multi-stakeholder yang melibatkan masyarakat, pengusaha, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah terbukti efektif dalam menciptakan keberlanjutan sektor pariwisata bahari. Implementasi konsep ekonomi sirkular melalui Bank Sampah dan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi solusi dalam mengatasi pencemaran laut sambil menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir. Keberhasilan implementasi SDG 14 di Indonesia memerlukan penguatan koordinasi lintas sektoral, pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, serta replikasi model-model inovatif ke seluruh wilayah Indonesia untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan berbasis laut secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., & Maghfira, A. (2023). Pengaruh Sampah Plastik Dalam Pencemaran Air Laut Di Kota Makassar. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 6(1), 25-29. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i1.24234>
- Alifa, N. N., & Zahidi, M. S. (2024). Pengembangan Ekonomi Biru Sebagai Strategi Indonesia Menuju Ekonomi Maju. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 38(1), 48-65. <https://doi.org/10.52318/jisip.2024.v38.1.4>
- Amalo, L. F., Putra, M. D., Wulan, L. D., Zuhri, M. I., Supardi, H., Agushara, L. M. A., & Rahman, A. (2025). *Restorasi Mangrove sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim di Desa Pantai Bahagia , Kabupaten Bekasi Mangrove Restoration as a Climate Change Mitigation Effort in Pantai Bahagia Village , Bekasi Regency*. 5(1), 20-29.
- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2023). Indonesia Blue Economy Roadmap 2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Barroso, S., Pinto, F. R., Silva, A., Silva, F. G., Duarte, A. M., & Gil, M. M. (2022). The Circular Economy Solution to Ocean Sustainability. *Research Anthology on Ecosystem Conservation and Preserving Biodiversity*, April, 875-901. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5678-1.ch044>
- Boekoesoe, L., & Maksum, T. S. (2022). Optimalisasi Pembangunan Desa dalam Mewujudkan



- SDGs Desa. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(1), 209-218.
<https://doi.org/10.37905/sibermas.v11i1.12103>
- Clarke, V. B. and V. (2024). Thematic analysis: A practical guide. *European Journal of Psychotherapy & Counselling*, 00(00), 1-4.
<https://doi.org/10.1080/13642537.2024.2391666>
- Elegbede, I. O., Akintola, S. L., Jimoh, A. A.-A., Jolaosho, T. L., Smith-Godfrey, S., Oliveira, A., Oladosu, A. O., Ramalho, D. C., Moruf, R. O., Afolabi, S., & Oloko, A. (2023). Blue Economy (Sustainability). *Encyclopedia of Sustainable Management*, 1-9.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_401-1
- Guterres, A. (2020). The sustainable development goals report 2020. *United Nations Publication Issued by the Department of Economic and Social Affairs*, 1-64.
- Jambeck, J. R., Roland, G., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Marine pollution. Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 764-768.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023. Pusat Data, Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal KKP.
- Martínez-Vázquez, R. M., Milán-García, J., & de Pablo Valenciano, J. (2021). Challenges of the Blue Economy: evidence and research trends. *Environmental Sciences Europe*, 33(1), 1-17. <https://doi.org/10.1186/s12302-021-00502-1>
- Nugroho, U. A., & Budianto, F. (2021). Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia. *Jurnal Media Perencana*, 2(1), 51-67.
<https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/20/13>
- Pace, L. A., Saritas, O., & Deidun, A. (2023). Exploring future research and innovation directions for a sustainable blue economy. *Marine Policy*, 148(May 2022), 105433.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105433>
- Rahadiarta I G, Wiranatha A S, S. I. N. (2021). Penerapan Empat Fungsi Manajemen Pada Pengelolaan Pariwisata Bahari Berkelanjutan Di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7(2), 669-689.
- Rusandi, A., Hakim, A., Wiryawan, B., Sarmintohadi, & Yulianto, I. (2021). Pengembangan Kawasan Konservasi Untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan di Indonesia. *Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 12(2), 137-147. <https://doi.org/10.29244/jmf.v12i2.37047>
- Snyder, H. (2021). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(August), 333-339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Templier, M., & Paré, G. (2015). A framework for guiding and evaluating literature reviews. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(August), 112-137.
<https://doi.org/10.17705/1cais.03706>
- Xiao, Yu, & Watson, Maria. (2017). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93-112.
<https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Zulkifli, Nurjannah, I., Usman, & Mokodompit, E. A. (2023). Implikasi Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Maritim. *OSF Preprints*, 1-15.
<https://osf.io/nps2v>